

Optimalisasi Kapasitas UMKM: Pendampingan Literasi Laporan Keuangan dan Pajak Tahunan di Kecamatan Moyo Utara

Arya Zulfikar Akbar¹, Muhammad Nur Fietroh¹, Reza Muhammad Rizqi¹, Nurida Fitriani¹, Rozzy Aprirachman¹, Rian Hardiansyah¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

INFO ARTIKEL

Diserahkan 14/03/2026
Direvisi 24/03/2026
Diterima 27/03/2026
Diterbitkan 03/04/2026

Kata Kunci:

Literasi Keuangan,
SAK EMKM,
Perpajakan UMKM,
Pendampingan Intensif

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan, termasuk di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan pemahaman pajak tahunan bagi pelaku UMKM setempat. Program dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa menggunakan pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan pelatihan teknis dan pendampingan intensif. Sebanyak 25 UMKM dari berbagai sektor berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung selama bulan Oktober 2024, meliputi survei awal, pelatihan literasi keuangan dan perpajakan, pendampingan door-to-door, serta evaluasi hasil. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada kapasitas peserta. Sebanyak 80% peserta mampu menyusun laporan laba rugi sederhana secara mandiri, 68% berhasil membuat laporan posisi keuangan sesuai SAK EMKM, dan 12 pelaku UMKM terfasilitasi memperoleh NPWP. Pemahaman peserta terhadap materi perpajakan meningkat dari rata-rata 38% (pre-test) menjadi 79% (post-test). Program ini membuktikan bahwa pendekatan pendampingan kontekstual dan berkelanjutan efektif mentransformasi perilaku pengelolaan keuangan UMKM. Rekomendasi tindak lanjut mencakup pembentukan kelompok belajar UMKM, digitalisasi pencatatan, fasilitasi akses permodalan, serta integrasi materi literasi keuangan dan pajak dalam program pembinaan pemerintah daerah.

Corresponding author email:
arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id



Copyright © Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun, serta mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada [10]. Angka tersebut mencerminkan betapa strategisnya peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat [3].

Meskipun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia masih kerap terhambat oleh berbagai tantangan internal, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kebiasaan mencatat transaksi keuangan secara teratur, belum memisahkan keuangan usaha

dengan keuangan pribadi, serta tidak mampu menyusun laporan keuangan yang layak sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis [2]. Kondisi ini menjadikan UMKM rentan terhadap kerugian finansial yang tidak terdeteksi dan sulit dalam mengakses layanan pembiayaan dari lembaga keuangan formal [12].

Permasalahan serupa dijumpai pada UMKM di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal terhadap 25 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, sebagian besar pelaku UMKM di kawasan ini hanya fokus pada kegiatan produksi dan penjualan tanpa melakukan pencatatan keuangan yang memadai. Mereka umumnya belum mengenal Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai acuan penyusunan laporan keuangan yang sesuai untuk skala usaha mereka. Selain itu, pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, khususnya mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% atas peredaran bruto, masih sangat terbatas [17].

Rendahnya literasi keuangan dan perpajakan di kalangan pelaku UMKM tidak hanya berdampak pada performa usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak [6]. Padahal, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 telah memberikan kemudahan bagi UMKM berupa pengenaan tarif PPh Final yang sangat rendah, yakni 0,5% dari omzet, dengan batas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun. Fasilitas ini dirancang untuk meringankan beban perpajakan pelaku usaha kecil sekaligus mendorong mereka untuk lebih tertib administrasi [7]. Namun demikian, ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap regulasi tersebut menyebabkan manfaat kebijakan ini belum dapat dirasakan secara optimal [1].

Berbagai kajian Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa program pelatihan dan pendampingan intensif merupakan salah satu strategi paling efektif untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan UMKM. Kegiatan seperti sosialisasi SAK EMKM, pelatihan pencatatan transaksi, hingga simulasi penyusunan laporan keuangan sederhana terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha secara nyata [11], [16]. Di sisi perpajakan, pendampingan terkait prosedur pelaporan SPT Tahunan, perhitungan PPh Final, dan pembuatan NPWP juga memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan riil di tingkat akar rumput. Mitra sasaran dalam program ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karakteristik mitra umumnya bergerak pada sektor usaha mikro berbasis rumah tangga, seperti produksi pangan olahan lokal, kerajinan tangan, dan perdagangan eceran skala kecil. Permasalahan utama yang dihadapi mitra mencakup lemahnya kapasitas dalam pencatatan transaksi keuangan, ketidakmampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi, serta minimnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, termasuk mekanisme penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Kondisi ini diperparah dengan belum pernah dilakukannya intervensi pendampingan serupa oleh institusi pendidikan maupun pemerintah daerah di wilayah tersebut [4].

Sebagai upaya pemecahan masalah, program ini mengusulkan pendekatan edukasi partisipatif berbasis pendampingan intensif yang mengintegrasikan dua komponen utama, yaitu literasi keuangan dan literasi perpajakan. Kerangka konseptual yang digunakan mengacu pada teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis, yang menekankan bahwa adopsi teknologi dan sistem baru, termasuk sistem pencatatan keuangan digital, sangat ditentukan oleh persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan oleh pengguna. Dalam konteks ini, pelaku UMKM perlu dibangun pemahamannya bahwa penyusunan laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk pengambilan keputusan bisnis dan akses permodalan. Di sisi perpajakan, pendekatan yang digunakan merujuk pada prinsip kepatuhan

sukarela (voluntary compliance) dalam teori perpajakan, di mana tingkat kepatuhan meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan regulasi yang tersedia.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas teknis pelaku UMKM di Kecamatan Moyo Utara dalam menyusun laporan keuangan sederhana yang mengacu pada SAK EMKM serta memahami tata cara penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan tahunan. Untuk meningkatkan kualitas capaian program secara terukur, kegiatan ini menetapkan target kuantitatif utama, yakni memastikan minimal 75% peserta mampu menyusun laporan laba rugi secara mandiri pada akhir masa pendampingan. Harapan jangka panjang yang ingin dicapai adalah terciptanya ekosistem UMKM yang tertib administrasi, memiliki daya saing tinggi, serta mampu mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan sebagai modal pengembangan usaha. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan kapasitas individu pelaku usaha, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya pada pilar pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Moyo Utara ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas finansial dan kemandirian usaha, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem UMKM yang tertib administrasi dan berdaya saing tinggi.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dirancang dengan metode komprehensif yang secara integral memadukan pendekatan partisipatif dengan strategi pendampingan intensif. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM diposisikan bukan sekadar sebagai objek penerima manfaat, melainkan subjek aktif dan mitra yang terlibat penuh dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari fase perencanaan awal, identifikasi kebutuhan usaha yang akurat, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi program secara kolaboratif. Pemilihan metode ini didorong oleh prinsip fundamental bahwa perubahan perilaku dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan dapat dicapai secara lebih efektif melalui keterlibatan langsung dan rasa kepemilikan program yang kuat, dibandingkan dengan pendekatan instruktif top-down semata [2]. Selain edukasi partisipatif, strategi pelaksanaan ini juga mengintegrasikan prinsip TAM (Technology Acceptance Model) untuk mendorong adopsi teknologi yang relevan, serta 'Voluntary Compliance' untuk membangun kemandirian usaha dan kesadaran sukarela dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam lima tahapan berurutan. Tahap pertama adalah survei dan pemetaan awal, di mana tim pengabdian melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan konkret yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan

perpajakan. Tahap kedua adalah penyusunan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik usaha peserta, mencakup modul literasi keuangan berbasis SAK EMKM dan modul pengantar perpajakan UMKM yang disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Tahap ketiga adalah sosialisasi dan pelatihan teknis yang dilaksanakan dalam dua sesi besar. Sesi pertama membahas materi pencatatan transaksi harian, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta penyusunan laporan laba rugi dan neraca sederhana. Sesi kedua berfokus pada pemahaman pajak UMKM, yakni tata cara penghitungan PPh Final 0,5%, prosedur pembayaran melalui e-billing, serta langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan secara daring. Setiap sesi diisi dengan diskusi interaktif, praktik langsung, dan studi kasus yang relevan dengan usaha peserta [8].

Tahap keempat adalah pendampingan intensif secara door-to-door, di mana tim pengabdian mengunjungi secara langsung setiap UMKM peserta untuk membantu menerapkan materi yang telah diajarkan pada kondisi usaha nyata mereka. Pendampingan ini dilakukan sebanyak tiga kali kunjungan per UMKM, dengan komunikasi lanjutan melalui grup WhatsApp untuk menjawab pertanyaan dan memberikan bimbingan jarak jauh. Tahap kelima adalah evaluasi, yang dilakukan dengan memberikan pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah kegiatan pendampingan selesai, untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta secara terukur.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Awal UMKM di Kecamatan Moyo Utara

Hasil survei awal menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Moyo Utara yang masih jauh dari standar yang diharapkan. Dari 25 UMKM yang menjadi peserta, sebanyak 84% mengaku tidak pernah membuat laporan keuangan dalam bentuk apapun, 72% tidak memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi, dan 100% belum mengetahui SAK EMKM sebagai standar akuntansi yang dirancang khusus untuk skala usaha mereka. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyebutkan bahwa ketiadaan pencatatan keuangan yang teratur menyebabkan pelaku usaha tidak mampu mengetahui laba bersih, menentukan harga jual berbasis biaya, maupun merencanakan perkembangan usaha [2].



Gambar 2. Potret Literasi Keuangan dan Pajak UMKM di Moyo Utara

Di sisi perpajakan, kondisinya bahkan lebih memprihatinkan. Sebanyak 76% peserta mengaku belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sementara 92% tidak mengetahui adanya fasilitas PPh Final tarif 0,5% yang dapat mereka manfaatkan. Fenomena ini mencerminkan rendahnya literasi pajak di kalangan pelaku UMKM, yang sejatinya merupakan wajib pajak potensial namun belum dapat berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara [6]. Banyak yang justru enggan mendaftarkan diri karena khawatir akan

beban pajak yang besar, padahal pemerintah telah menyediakan fasilitas perpajakan yang sangat ramah bagi UMKM melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 [7].

Minimnya pengetahuan keuangan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan dan sumber informasi yang relevan. Sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Moyo Utara adalah pelaku usaha mandiri yang menjalankan bisnisnya secara informal dan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Kondisi geografis yang relatif jauh dari pusat kota turut membatasi keterlibatan mereka dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan di tingkat kabupaten (Ghasarma et al., 2022). Situasi inilah yang menjadi landasan penting bagi tim pengabdian untuk hadir langsung ke tengah-tengah komunitas UMKM dengan program pelatihan yang bersifat kontekstual dan mudah diterapkan.

3.2 Pelatihan Literasi Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM

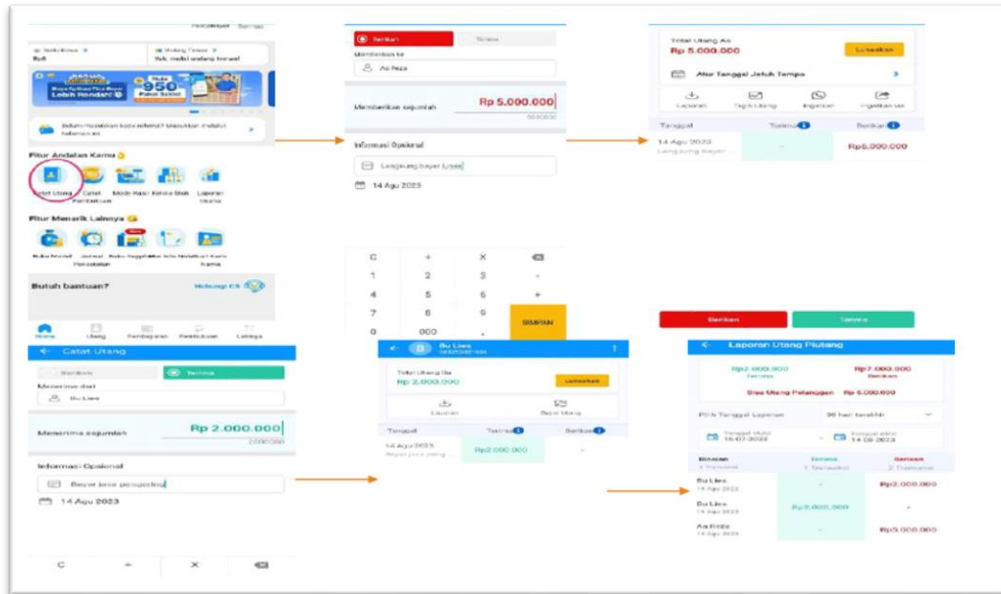
Sesi pelatihan literasi laporan keuangan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran praktis, di mana peserta langsung diajak mengerjakan lembar kerja berisi transaksi fiktif yang mencerminkan kondisi usaha nyata sehari-hari. Materi dimulai dari konsep paling dasar, yakni pengertian aset, kewajiban, dan ekuitas, kemudian berlanjut ke pencatatan jurnal sederhana, pembuatan buku kas harian, hingga penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sesuai SAK EMKM. Penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh yang relevan dengan usaha peserta terbukti sangat efektif dalam mempercepat pemahaman [11].



Gambar 3. Kegiatan Penyampaian Materi Sosialisasi UMKM

Salah satu hambatan terbesar yang ditemukan dalam proses pelatihan adalah kebiasaan pelaku UMKM mencampurkan pengeluaran pribadi dengan pengeluaran usaha. Hal ini menjadikan perhitungan laba bersih menjadi tidak akurat dan menyebabkan distorsi dalam gambaran kesehatan keuangan usaha. Tim pengabdian menyampaikan pentingnya pemisahan rekening usaha dan pribadi, serta mengajarkan cara membuat kas kecil untuk kebutuhan harian usaha. Temuan ini konsisten dengan apa yang dilaporkan oleh Nasihin dkk. [8] dalam kegiatan pendampingan UMKM di Jawa Barat, di mana pemisahan keuangan menjadi tantangan utama yang harus diatasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pelaporan yang lebih kompleks.

Setelah sesi pelatihan, peserta diberi modul panduan yang dapat dijadikan rujukan mandiri. Selama sesi pendampingan, tim pengabdian membantu setiap UMKM menyusun bagan akun yang disesuaikan dengan jenis usahanya, mencatat ulang transaksi-transaksi yang telah terjadi selama satu bulan terakhir, dan menghasilkan laporan laba rugi sederhana pertama mereka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah kegiatan pendampingan, 80% peserta mampu membuat laporan laba rugi sederhana secara mandiri, sementara 68% berhasil menyusun laporan posisi keuangan dengan benar. Capaian ini memperlihatkan efektivitas metode pendampingan berbasis praktik langsung [12] [15].



Gambar 4. Tahapans Pembuatan Laporan Laba Rugi Sederhana

Penyusunan laporan keuangan yang baik dan terstandar juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kelangsungan usaha. Dengan memiliki laporan keuangan yang akurat, UMKM dapat lebih mudah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, merencanakan ekspansi usaha, serta memenuhi kewajiban pelaporan kepada instansi terkait. Kodriyah, Wijaya, & Haryadi [9] menegaskan bahwa literasi keuangan dan pembukuan berbasis SAK EMKM merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas manajemen usaha dan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

3.3 Pendampingan Pemahaman Pajak Tahunan UMKM

Sesi pendampingan perpajakan diawali dengan penyampaian materi tentang hak dan kewajiban perpajakan UMKM secara umum. Peserta diberikan pemahaman mengenai pengertian wajib pajak, jenis-jenis pajak yang relevan bagi usaha mereka, serta pentingnya memiliki NPWP sebagai identitas perpajakan. Banyak peserta yang sebelumnya enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena persepsi negatif tentang besarnya beban pajak. Persepsi ini diluruskan dengan menjelaskan secara rinci fasilitas PPh Final 0,5% yang berlaku bagi UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun, sesuai ketentuan PP 55 Tahun 2022 [7].



Gambar 5. Kegiatan Penyampaian Materi Literasi Laporan Keuangan dan Pajak Tahunan

Peserta kemudian diajak untuk mensimulasikan penghitungan PPh Final berdasarkan omzet usaha masing-masing. Simulasi ini sangat disambut antusias, karena peserta dapat langsung melihat bahwa beban pajak yang harus mereka tanggung sesungguhnya sangat kecil, bahkan nol rupiah bagi yang omzetnya belum melampaui Rp500 juta per tahun. Penyuluhan juga mencakup prosedur teknis pembayaran pajak melalui platform e-billing di situs pajak.go.id, tata cara mendapatkan kode billing, serta alur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode demonstrasi langsung menggunakan proyektor dan pendampingan satu per satu bagi peserta yang belum familiar dengan penggunaan teknologi digital [18].

Salah satu capaian penting dari sesi perpajakan adalah terfasilitasinya pendaftaran NPWP bagi 12 pelaku UMKM yang belum memilikinya. Tim pengabdian mendampingi langsung proses pendaftaran melalui laman ereg.pajak.go.id, mulai dari pengisian formulir hingga aktivasi akun. Proses ini membuktikan bahwa hambatan pendaftaran NPWP bagi pelaku UMKM bukan terletak pada kerumitan sistem, melainkan pada kurangnya pengetahuan dan pendampingan yang memadai. Hidayatullah & Rizky [1] dalam kajian mereka menggarisbawahi bahwa pelatihan pembuatan laporan keuangan dan pajak secara terpadu mampu mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih konsisten dan tepat waktu. Tabel berikut menyajikan data dari 10 peserta (Sampel) UMKM untuk mendemonstrasikan hasil peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan simulasi pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi.

Tabel 1. Nilai Pre-test dan Post-test para peserta UMKM

No	Nama Peserta	Nilai Pre-test (%)	Nilai Post-test (%)	Peningkatan Pemahaman (%)	Fokus Pemahaman Baru (Berdasarkan Simulasi)
1	Wajib Pajak UMKM A	30	80	+50	Mampu mencantumkan penghasilan bruto per bulan dengan tepat.
2	Wajib Pajak UMKM B	45	85	+40	Memahami cara menghitung PPh Final 0,5% terutang.
3	Wajib Pajak UMKM C	25	70	+45	Mengetahui letak kolom pernyataan pemenuhan kewajiban pajak.
4	Wajib Pajak UMKM D	50	90	+40	Sangat menguasai perhitungan PPh terutang & pelaporan omzet.
5	Wajib Pajak UMKM E	40	75	+35	Mampu memisahkan data omzet yang dikenakan pajak dan yang bebas pajak (PTKP).
6	Wajib Pajak UMKM F	35	80	+45	Memahami alur pengisian kolom dari awal hingga akhir form.
7	Wajib Pajak UMKM G	30	75	+45	Mampu mencantumkan penghasilan bruto tanpa tertukar dengan laba bersih.
8	Wajib Pajak UMKM H	45	85	+40	Lancar menghitung PPh terutang dari omzet fiktif yang diberikan.
9	Wajib Pajak UMKM I	40	80	+40	Paham cara menyetujui pernyataan kebenaran data pada SPT.
10	Wajib Pajak UMKM J	40	70	+30	Menyadari pentingnya pencatatan omzet rutin untuk pengisian SPT.
Rata-Rata Kelas		38%	79%	+41%	Lonjakan Signifikan (Sesuai Asesmen Asiah dkk., 2025)

Sumber: data diolah, 2026

Di akhir sesi, dilakukan simulasi pengisian SPT Tahunan UMKM Orang Pribadi menggunakan data omzet fiktif yang representatif. Peserta diajak memahami setiap kolom pengisian, termasuk cara mencantumkan

penghasilan bruto, menghitung PPh terutang, serta menyatakan pemenuhan kewajiban pajak. Hasil post-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap materi perpajakan meningkat dari rata-rata 38% pada pre-test menjadi 79% pada post-test, sebuah lonjakan signifikan yang mengindikasikan efektivitas metode pelatihan yang digunakan (Asiah, Sabaruddinsah, & Wulandari, 2025).

3.4 Hambatan Pelaksanaan dan Usulan Tindak Lanjut

Meskipun kegiatan ini berjalan dengan baik, beberapa kendala tetap dijumpai di lapangan. Pertama, tingkat kehadiran yang tidak selalu konsisten disebabkan oleh kesibukan pelaku UMKM dalam mengelola usaha sehari-hari, terutama pada pelaku usaha di sektor kuliner yang harus mempersiapkan dagangan pada jam-jam tertentu. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian menawarkan fleksibilitas jadwal pendampingan dan memanfaatkan media WhatsApp sebagai sarana konsultasi asinkron. Kedua, tidak semua peserta memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk mengoperasikan aplikasi e-billing dan e-filing secara mandiri. Tim pengabdian menyikapinya dengan menyediakan panduan bergambar yang dapat dicetak dan dibawa pulang.

Ketiga, terdapat hambatan motivasional dari beberapa peserta yang merasa pengelolaan keuangan formal terlalu rumit dan memakan waktu. Untuk itu, tim pengabdian memperkenalkan template laporan keuangan sederhana berbasis *Microsoft Excel* dan *Google Spreadsheet* yang dapat memudahkan pencatatan tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi yang mendalam. Pendekatan ini selaras dengan yang diterapkan oleh Ginting dkk. [5], yang membuktikan bahwa penggunaan aplikasi digital sederhana mampu meningkatkan konsistensi pelaku UMKM dalam mencatat transaksi keuangan setiap hari.

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian merekomendasikan beberapa program lanjutan yang perlu diinisiasi oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Program-program tersebut mencakup: (1) pembentukan kelompok belajar UMKM yang bertemu secara rutin untuk saling berbagi pengalaman dan memecahkan masalah keuangan bersama; (2) pelatihan lanjutan tentang digitalisasi pencatatan keuangan menggunakan aplikasi berbasis mobile; (3) fasilitasi akses ke lembaga keuangan bagi UMKM yang sudah memiliki laporan keuangan terstandar; serta (4) integrasi materi literasi keuangan dan pajak dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa. Kerangka kerja pengembangan kapasitas UMKM yang komprehensif dan berkelanjutan seperti ini penting untuk memastikan bahwa dampak kegiatan pengabdian tidak berhenti pada saat program berakhir [2][16].

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Moyo Utara berhasil meningkatkan literasi laporan keuangan dan pemahaman pajak tahunan bagi pelaku UMKM secara signifikan. Melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan intensif berbasis SAK EMKM, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam mencatat transaksi, menyusun laporan laba rugi dan neraca sederhana, serta memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan rata-rata pemahaman dari 38% menjadi 79% dalam aspek perpajakan, serta 80% peserta yang mampu membuat laporan keuangan sederhana secara mandiri setelah pendampingan, mencerminkan efektivitas pendekatan partisipatif yang digunakan.

Keberhasilan program ini juga menunjukkan bahwa hambatan utama bagi pelaku UMKM bukan terletak pada ketidakmampuan mereka untuk belajar, melainkan pada kurangnya akses terhadap pendampingan yang kontekstual, sabar, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan, untuk secara konsisten hadir mendampingi komunitas UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di Kecamatan Moyo Utara memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi usaha yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Moyo Utara yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Moyo Utara dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan program. Tidak lupa, terima kasih kepada Universitas Teknologi Sumbawa yang telah memberikan dukungan pendanaan dan kelembagaan bagi terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hidayatullah dan M. Rizky, "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara Daring," *Jurnal Berdaya Mandiri*, vol. 3, no. 1, pp. 446-451, 2021.
- [2] M. Putri and E. Iryanti, "Peningkatan Literasi Keuangan UMKM melalui Pendampingan Pencatatan Keuangan Terintegrasi di Kelurahan Kejawan Putih Tambak," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, vol. 7, no. 1, pp. 939-947, 2026.
- [3] Munthe, M. Yarham, and R. Siregar, "Peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, vol. 2, no. 3, pp. 593-614, 2023.
- [4] Z. Akbar, D. Hambali, R. M. Rizqi, D. I. Syahfitri, N. Nurfadliyah, N. H. Putri, et al., "Edukasi dan peningkatan kemampuan pajak perangkat desa dalam mewujudkan kepatuhan dan kesadaran pajak," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, 2024.
- [5] D. B. Ginting, H. Idris, M. Ryketeng, R. Setiawan, and A. N. Azisah, "Pendampingan Penggunaan Aplikasi BukuWarung sebagai Upaya Edukasi Transformasi Pencatatan Akuntansi Manual ke Digital pada Usaha Rumah Makan Prasmanan Emmy Saelan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 4, pp. 315-325, 2025. doi: 10.61231/k07r7395.
- [6] Frederica, E. H. Herianti, M. Mutiah, S. Susilawati, T. Nuryati, and S. Sapridin, "Peningkatan pengetahuan perpajakan atas penyesuaian pengaturan pajak penghasilan UMKM no. 55 tahun 2022: pendekatan sosialisasi dan penyuluhan pada UMKM binaan BUMDes," *Jurnal Terapan Abdimas*, 2024. doi: 10.25273/jta.v9i2.19425.
- [7] Direktorat Jenderal Pajak, "WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum," 2023.
- [8] Nasihin, D. Purwandari, H. N. Ardiansyah, and F. A. Sujaya, "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Pelaporan Pajak Tahunan UMKM," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 2, 2024.
- [9] K. Kodriyah, H. Wijaya, and E. Haryadi, "Literasi Keuangan Dan Pelatihan Pembukuan SAK-EMKM Di Sentra Tas Desa Kadu Genep Serang Banten," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, p. 126, 2022. doi: 10.24198/kumawula.v5i1.36086.
- [10] Kemenkop UKM, "Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2023," Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2024.
- [11] L. W. Rahajeng, T. N. Realita, and R. Firdaus, "Peningkatan Kualitas Industri Konveksi: Pendampingan Implementasi SAK EMKM dan Literasi Keuangan UMKM Marble Studio," *Jurnal Edukasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 19-26, 2026. doi: 10.36636/eduabdimas.v5i1.8354.
- [12] M. E. Wende dan H. As'ari, "Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana UMKM," *Jurnal Peradaban Masyarakat*, vol. 3, no. 3, pp. 129-132, 2023. doi: 10.55182/jpm.v3i3.287.
- [13] N. Asiah, S. Sabaruddinsah, and D. S. Wulandari, "Pelatihan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan pada UMKM: Studi Pengabdian di Tambun Selatan," *Lentera Pengabdian*, vol. 3, no. 02, pp. 152-159, 2025.
- [14] R. Ghasarma, D. Eka, Y. Karimudin, I. Isnurhadi, and P. L. Bang, "Pendampingan Pengelolaan Keuangan UMKM dan Optimalisasi Usaha Masyarakat dalam Menghadapi Era Normal Baru di Kecamatan Ilir Barat II

- Kota Palembang," Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, vol. 3, no. 1, pp. 65-72, 2022. doi: 10.29259/jscs.v3i1.49.
- [15] R. Marliadi, W. B. Jamaludin, R. Nirwana, J. Jakiroh, R. Hilmi, and M. M. Mafazy, "Optimalisasi Pelaporan Keuangan Sesuai SAK EMKM Bagi Pelaku Usaha Mikro," *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, pp. 280-287, 2026.
- [16] S. Juriah, R. Juniawaty, R. Ningsih, and K. Herwati, "Optimalisasi UMKM Melalui Penerapan Akuntansi Biaya, Laporan Keuangan dan Administrasi Perpajakan di Jatinegara Kaum," *Jurnal SOLMA*, vol. 14, no. 3, 2025. doi: 10.22236/solma.v14i3.20123.
- [17] S. Resmi, R. W. Pahlevi, and F. Sayekti, "Implementation of financial report and taxation training: performance of MSMEs in Special Regions Yogyakarta," *Jurnal Siasat Bisnis*, vol. 25, no. 1, pp. 57-68, 2021. doi: 10.20885/jsb.vol25.iss1.art5.
- [18] Y. Suryani, "Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021.